



Genealogi Kuasa dalam Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik di “Wilayah Pardikan” Jawa¹

Ronny Ersya Novianto Putra², dan Hempri Suyatna³

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menggambarkan dan mendialektikakan dinamika dan relasi kepentingan aktor dalam pengembangan pertanian organik; (2) mengidentifikasi aktor yang diuntungkan dan dirugikan dalam pengembangan pertanian organik. Metode penelitian kualitatif untuk pembangunan dilakukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi melalui informan para aktor penggerak yang terlibat pertanian organik di suatu wilayah tertentu. Penelitian dilakukan di suatu wilayah di Jawa yang disebut sebagai “Wilayah Pardikan” (bukan nama sebenarnya) – suatu nama samaran untuk kepentingan menjaga kerahasiaan para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan genealogi kuasa (kuasa wacana) telah memungkinkan penguasa untuk mendominasi pengembangan pertanian organik sehingga belum efektif memberikan peningkatan kesejahteraan serta akses terhadap produktivitas petani. Faktanya sejak tahapan perencanaan sampai dengan implementasi kepentingan penguasa dan aktor penggerak mendominasi arena kebijakan pengembangan pertanian organik. Klaim dan pencitraan keberhasilan pengembangan pertanian organik merupakan rekayasa yang lahir dari kepentingan dialektis aktor atas dinamika relasi kuasa (menurut perspektif Foucauldian). Genealogi kuasa yang diterapkan dalam kasus ini hanya menghasilkan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Yaitu pihak yang memiliki ruang jaringan wacana (normalizing judgment) yang kuat untuk mempengaruhi pihak lain. Ironisnya petani menjadi pihak yang dirugikan dalam pengembangan pertanian organik karena hanya menjadi obyek pembangunan pertanian.

Kata kunci: genealogi kuasa, kesejahteraan petani, pembangunan pertanian, pertanian organik

Abstract

The purpose of this research are aims (1) to describe and discuss dynamics and relation interest of actors in the development of organic farming; (2) to identify actors who benefited and disadvantaged in the development of organic farming. A qualitative research method for development is applied in this research. The collection of data is conducted by a field observation, interviews and documentations that involved informants of movers actors involved in the development of organic farming in a particular district. The research was conducted in the agricultural district area in Java named “Pardikan district” (not a real name of the district) – the alias name is given in order to keep the confidentiality of the informants involved in this research. The results shows that the genealogy of power (through the dissemination of discourse) has enabled the rulers to dominate the implementation of organic farming so that it has not been effectively provides increased prosperity as well as access to optimum productivity for farmers. In fact, from the stages of planning to the implementation, the interests of the authorities and mover actors have dominated the policy for organizing organic farming. The claims and image over a successful organic farming are fabricated as a result of dialectic relationship dynamics over the actors’ interests power (according to a Foucauldian perspective). The genealogy of power in this case produces only some beneficiaries. Those parties that grant a spatial network for establishing their discourse (or normalizing judgment) in order to control other parties. Ironically, farmers are disadvantaged from the practice of organic farming, due to the fact that they are only treated as the object of agricultural development.

Keywords: genealogy of power, farmers’ welfare, agricultural development, organic farming

¹ Untuk mengutip artikel ini: Putra & Suyatna. 2018. ‘Genealogi Kuasa dalam Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik di “Wilayah Pardikan” Jawa. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5 (1): 69-84.

² Ronny Ersya Novianto Putra adalah mahasiswa pascasarjana Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM

³ Hempri Suyatna adalah staf pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM.

A. Pendahuluan

Isu peningkatan kesejahteraan petani menjadi primadona bangunan kebijakan di Indonesia. Era berganti namun isu ini tetap menjadi primadona untuk diwacanakan para elite penguasa mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kota-kabupaten. Isu ini pula melahirkan pembajakan kepentingan elite politik dan kesejahteraan semu yang dinikmati para petani sebagai obyek atas pewacanaan isu tersebut.

Mafhum diketahui pembangunan Indonesia yang telah berpindah rel dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah berlomba untuk melakukan inovasi kebijakan untuk menuju pada pembangunan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut, tentu inovasi tersebut harus berpijak pada potensi daerah serta kemampuan produktivitas masyarakat daerah tersebut. Uraian diatas melahirkan wacana dan relasi kekuasaan yang mengikatnya, kekuasaan bukan bersifat plural/sentralistik namun tumbuh dari berbagai ruang peripheral yang terdapat dari interaksi antar aktor dalam ruang inovasi kebijakan. Tentu dalam inovasi tersebut isu peningkatan kesejahteraan petani menjadi primadona. Hal ini wajar karena 83 persen kota/kabupaten di Indonesia memiliki keunggulan komparatif daerah berupa pengembangan pertanian. Singkatnya, ibarat tikus mati dalam lumbung isu primadona tersebut melahirkan harapan kesejahteraan pada para petani.

Kajian ini membahas mengenai salah satu inovasi kebijakan yang menggunakan isu kesejahteraan petani sebagai central issue policy. Wilayah yang cukup terkenal dengan nama masa lalunya

“Pardikan”. Dikarenakan penelitian ini merupakan refleksi dan evaluasi kritis atas kebijakan pembangunan daerah di era otonomi daerah. Maka demi mengindahkan kaidah/etika akademik, nama tempat disamarkan menggunakan nama masa lalu obyek studi kasus serta nama-nama informan sengaja dirahasiakan dalam pembahasan kajian ini dengan berbagai pertimbangan yang berkembang di lapangan. Pardikan merupakan wilayah yang indah dengan tulang punggung nafkah utama pertanian, beberapa tahun ini berani bersolek menjadi kota pariwisata buatan yang meredupkan perlahan-lahan pertanian, namun inovasi kebijakan berupa pengembangan pertanian organik menjadi romantisme masa lalu kota ini dilahirkan oleh penguasa sebagai bentuk kuasa wacana (genealogi kuasa). Mendasari hal tersebut setelah perubahan haluan pembangunan kota yang kontradiktif telah melahirkan adanya penyusutan luas lahan pertanian yang tinggi mencapai 11,49 persen/pertahun serta adanya keluh kesah petani saat penguasa berkeliling beberapa desa sentral pertanian sebelum tahun politik pilkada medio 2010-2012.

Penelitian ini meminjam kerangka pemikiran Foucault tentang Genealogi Kekuasaan atau Power/ Knowledge (Foucault, 1969a:64; Foucault, 2002b:164). Kuasa/kekuasaan harusnya menempatkan kepentingan aktor yang paling lemah untuk membangun ruang produktif beserta jaringannya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan. Genealogi/kuasa wacana harus membentuk diskursus produktif, dinamika relasi dan relasi kuasa antar aktor untuk menempatkan pendelegasian kuasa dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, karena kuasa tanpa ilmu pengetahuan tidak akan menciptakan kesejahteraan secara

fundamental. Pemaparan gagasan dalam kajian ini terpilah dalam tiga bagian besar berikut: pertama, paparan akan cuplikan kebijakan pertanian Indonesia serta penjelasan singkat atas kebijakan pengembangan pertanian organik. Kedua, kajian ini menggambarkan siapa saja aktor yang terlibat beserta kepentingannya, dan hasil pertarungan dari dinamika relasi dan relasi kuasa atas pengembangan pertanian organik. Ketiga, mengidentifikasi aktor yang diuntungkan dan dirugikan atas pengembangan pertanian organik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif utamanya untuk pembangunan (Skovdal & Cornish 2015: 4-8). Adapun tahapan penelitian yang telah dilakukan berupa tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam tahapan observasi, peneliti melakukan pencarian fakta-fakta lapangan pada daerah pengembangan pertanian organik berupa:

1. Berapa luasan pengembangan pertanian organik di desa/kelurahan tersebut?;
2. Siapa aktor yang terlibat? serta
3. Bagaimana keberlanjutan pengembangan pertanian organik?

Tahapan wawancara digunakan untuk mengkroscek temuan observasi lapangan, peneliti mewawancarai informan sebagai berikut:

1. aktor penggerak yaitu empat pejabat di Bappelitbangda dan Dinas Pertanian kota Pardikan; (b) tiga anggota DPRD kota Pardikan 2009-2014 dan 2014-2019 lintas partai politik;

2. aktor penjalan dilapangan yaitu delapan kepala desa/lurah dan dua petani di daerah pengembangan pertanian organik.

Tahapan dokumentasi digunakan untuk menemukan berbagai fakta yang tersembunyi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan pertanian organik. Dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa:

1. Garis Besar *Road Map* Pengembangan Pertanian Organik;
2. Rencana Induk Pengembangan Pertanian Organik; Draf Raperda Pengembangan Pertanian Organik;
3. Berita media massa cetak dan online yang berhubungan dengan pengembangan pertanian organik serta dokumen lain yang relevan dengan pengembangan pertanian organik.

C. Hasil Penelitian: Dinamika Kebijakan, Genealogi Kuasa dan Kepentingan Aktor

Dalam pembahasan ini terdapat tiga sub tema hasil penelitian yang secara khusus akan dijabarkan melalui temuan atas: (1) dinamika kebijakan pertanian dan implikasinya pada konteks kesejahteraan petani lokal khususnya di wilayah Pardikan; (2) genealogi kuasa yang menjabarkan pada bagaimana bekerjanya strategi pewacanaan sehingga mendominasi pola-pola pengembangan pertanian organik; (3) identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan pertanian organik dan kepentingan-kepentingannya yang bersifat dominan.

C.1. *Dinamika Kebijakan Pertanian Indonesia: Elite Capture dan Bayang Semu Kesejahteraan*

Selama ini pembangunan pertanian Indonesia hanya memberikan bayang semu kesejahteraan petani. Hal tersebut terekam dalam dinamika pembangunan pertanian sejak era kolonial sampai sekarang. Petani menjadi obyek pembangunan pertanian yang didalamnya terdapat pembajakan elite (elite capture) untuk kepentingan politik sesaat yang menciptakan bayang-bayang semu kesejahteraan. Era kolonial terdapat setidaknya dua periodisasi yaitu masa pendudukan Belanda dan Jepang. Kebijakan pertanian yang ada menguntungkan kepentingan para penjajah dan membuat penderitaan petani Bumi Putera. Diawali dengan adanya inisiasi pengusaha dan kerajaan Belanda untuk membuat perusahaan multinasional pertanian dan perdagangan komoditas pertama yang bernama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). VOC berhasil dalam 200 tahun (1602 sampai 1800) menghegemoni bangsa penghasil komoditas untuk menumpuk kekayaan kerajaan Belanda dan para pengusaha yang tergabung dalam VOC. Kebangkrutan VOC akibat budaya korupsi dan manajemen yang buruk dari pengelolaannya serta dalam langkah kebijakannya bersifat ekstratif, yakni menyedot surplus ekonomi tersedot maksimal tanpa mempedulikan kondisi rakyat yang sumber daya produksinya dirampas, dan petani-petani Bumi Putera hidup pas-pasan atau dalam kondisi subsistensi pendapatan (Latif, 2016: 262; Boediono, 2016: 35)

Kebijakan yang dikendalikan VOC berakhir maka kerajaan Belanda kemudian membentuk pemerintahan Hindia Belanda, terdapat setidaknya dua kebijakan besar yaitu kebijakan Tanam Paksa dan kebijakan pertanian dengan menggunakan

politik etis. Medio 1830 dalam kebijakan pertanian Hindia Belanda dengan nama Tanam Paksa (Cultuurstelsel). Pulau Jawa menjadi daerah utama pengembangannya, sistem yang oleh pemerintah kolonial saat itu membebaskan petani untuk bertanam namun dalam satu tahun petani wajib menanam komoditas laris di pasar perdagangan dunia saat itu seperti: kopi, tebu, rempah-rempah, indigo. Komoditas tersebut diatur jumlah, kualitas, dan harga oleh pemerintah Hindia Belanda. Pengumpul komoditas tersebut terdiri atas bupati, kepala desa, dan pedagang China. Praktik budaya ijon di Indonesia diawali dari era kebijakan tersebut. Kondisi paceklik pada tahun 1840 membuat penurunan produksi komoditas yang signifikan dan kelaparan massal. Dari kondisi tersebut pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat kebijakan pertanian berbasis politik etis, di mulainya era ini dengan menerbitkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Tiga kebijakan utama yang digulirkan yaitu: a. Revitalisasi irigasi kearah modern; b. Pendidikan dengan memanfaatkan kelompok terpelajar Bumi Putera untuk mengajar kelompok masyarakat lainnya; dan c. Transmigrasi untuk memperluas jangkauan sumber produksi dari Jawa ke wilayah lain di Nuswantara. Latar belakang kebijakan tersebut merupakan bentuk dari politik balas budi kerajaan Belanda karena perekonomiannya terselamatkan oleh surplus ekonomi yang dihasilkan aktivitas Tanam Paksa (Boediono, 2016: 45-51; Latief, 2016: 268-271).

Pasca penyerahan kekuasaan kerajaan Belanda selaku penguasa Hindia Belanda kepada kekaisaran Jepang pada Maret 1942. Praktis kebijakan pertanian berubah total dari akumulasi surplus ekonomi menjadi berorientasi pemenuhan suplai

pangan bagi kekuatan armada perang Jepang di Asia Pasifik. Namun masa tersebut tak bertahan lama pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 sekutu berhasil menghancurkan kekuasaan Jepang lewat bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki yang membuat konstelasi ekonomi politik berubah dimana Jepang mengaku kalah dengan sekutu.

Indonesia jajahan Jepang kemudian menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pemerintahan Indonesia masa tersebut bernama Orde Lama. Rezim tersebut kemudian dengan cepat membentuk pemerintahan. Soekarno dan M.Hatta berpandangan sama bahwa perlindungan petani dan pangan menjadi prioritas utama. Melalui kementerian Kemakmuran Rakyat sektor pertanian dan kelautan di garap bebarengan. Swasembada beras dikerjakan selama 5 tahun (1952-1956) melalui Program Kesejahteraan Kasimo yang dikendalikan Yayasan Bahan Makan (BAMA), kemudia berganti nama menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM) (1953) sampai program ini berakhir 1956 (Linblad, 2001:201; Van Zanden & Marks, 2012: 120).

Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) di era Soekarno telah memikirkan diversifikasi pangan menghadapi paceklik serta perubahan iklim/cuaca dan panca usaha tani (1959-1964) tentu jauh sebelum rezim setelahnya memperkenalkan hal tersebut, dan yang cukup menarik dan membuat banyak negara seperti Venezuela, Kuba, Bolivia datang ke Indonesia ialah perlindungan yang ketat atas tanah bagi pertanian lewat Undang Undang (UU) Pokok Agraria No 05 tahun 1960. Setelah beberapa dasawarsa baru diketahui bahwa penerapan Land Refrom, perlindungan dan pembangunan kesejahteraan petani di kawasan Bolivia, Kuba, Venezuela yang sukses salah satunya

dipengaruhi karena adopsi ketiga negara pada tiga pilar kebijakan dalam Pancasila dan UU Pokok Agraria No 05 tahun 1960, namun keberhasilan ketiganya tidak seiring sejalan dengan negara yang memiliki konsep (baca: Indonesia), agresi militer Belanda sampai dua jilid dan diperparah dengan pemberontakan yang ditunggangi motif politik, membuat kebijakan pertanian tidak berjalan sepenuhnya, hal ini membuat terdapat pilihan strategi ekonomi politik yang dilakukan oleh rezim berkuasa dengan politik sebagai panglima pembangunan yang menyampingkan terlebih dahulu prioritas ekonomi yang juga menyentuh sektor pertanian dan kemaritiman sektor penting perekonomian, imbas dari hal tersebut tercatat hiperinflasi (594,50%), guncangan sisi penawaran dan permintaan uang serta barang, yang sebenarnya berawal dari culturalshock rakyat terhadap banyaknya pencetakan uang untuk pembangunan prasarana fisik (jalan, jembatan, dan bangunan ikonik) dan pertahanan (angkanya mencapai 1.009,100 dalam jutaan rupiah atau Rp 1,09 Miliar di tahun 1965) yang tidak dibarengi peningkatan produktivitas sektor unggulan dalam hal ini pertanian dan kelautan saat itu (Novianto Putra, 2016:74-87; Linblad, 2001:215; Yaffe, 2015:09-18).

Terdapat hal sangat menarik dalam kebijakan pertanian era Orde Lama, di tengah penerapan politik sebagai panglima, mengingat kondisi perpolitikan yang belum stabil, namun di sisi massa rakyat perdesaan kebijakan Land Refrom menjadi kebijakan populis yang sedikit dirasakan manfaatnya oleh rakyat pertanian, zaman orde lama mengenal empat pembagian hak penguasaan tanah yakni hak bengkok, hak banda desa, hak narawita, dan hak yasan. Setelah diterapkannya empat hak

yang melekat pada tanah tersebut orientasi masyarakat petani berubah ke arah komersialisasi lahan, dimana peruntukkan penggarap yang dulu berasaskan kekeluargaan bermotif patron-client menjadi berpola tuan tanah dan buruh penggarap, hal ini sangat meminggirkan buruh tani penggarap yang membutuhkan tanah untuk menyambung kehidupan sehari-hari (Suseno & Suyatna, 2006:34)

. Era orde baru, masa di mana liberalisasi pertanian atau dikenal pula era komersialisasi pertanian. Tonggak dimulainya revolusi hijau yang berkiblat pada industri pertanian. Dengan cara arogansi negara (pemerintah pusat) untuk memaksa petani beralih pada pupuk dan bibit transgenik dari pabrikan, praktik ini memudahkan budaya bertani yang diajarkan nenek moyang misalnya tandon bibit dan pupuk organik yang telah berlangsung berabad-abad.

Bayang semu kesejahteraan petani nampak kentara dengan banyaknya praktik kamufase politik yang dibajak oleh elite politik dan kelompok berkepentingan (kaum kapitalis), salah satunya praktik Kredit Usaha Tani (KUT) yang menguap dan muncul banyak indikasi penyelewengan bahkan korupsi berjamaah dari berbagai pihak yang belum tuntas sampai sekarang.

Era reformasi makin menyurutkan proses kebijakan pembangunan liberalisasi pertanian. Negara telah mengobrol murah pertanian, memberi perlindungan di sisi lain dan menjual kepada kapitalis di sisi yang lain. Atas nama perjanjian utang Letter of Intent (LoI) pertanian menjadi salah satu sektor kuat dalam daftar liberalisasi ekonomi. Misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) No 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Bagi Kepentingan Umum, menjadi contoh dari produk hukum yang melemahkan keberadaan lahan pertanian atas dasar semangat pembangunan berkelanjutan yang ramah atas investasi (Suseno & Suyatna, 2006: 64).

Lahan pertanian yang telah rusak akibat penggunaan pupuk pabrik berlebih, membuat produktivitasnya menurun drastis hal ini menjadi penyebab banyaknya petani di kawasan potensial lebih memilih menjual lahan pertaniannya untuk kepentingan kapitalistik (pabrik maupun perumahan). Dari pemaparan di atas nampak gamblang bahwa dinamika pembangunan pertanian Indonesia sangat jauh dari kata perlindungan dan pembangunan kesejahteraan petani namun dekat dengan proses *de-kesejahteraan* petani.

C.2. Genealogi Kuasa Pengembangan Pertanian Organik

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pardikan Tahun 2010-2030, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pardikan 2003-2013, perubahan dasar hukum tersebut membuat transformasi pembangunan menjadi sangat masif utamanya perizinan atas tempat wisata dan hotel. Dalam dasar hukum sebelumnya pendirian atas tempat wisata dan hotel diatur sangat ketat dan harus patuh dengan aturan yang ada, hal tersebut dilakukan agar pertanian tidak tergusur oleh makin pesatnya perkembangan kota. Mengingat kota Pardikan merupakan titik nol sumber air utama bagi Galuh Kamulyan.

Membangun romantisme untuk meraup suara massa rakyat dalam perhelatan Pilkada Pardikan medio 2012. Walikota petahana membuat visi pembangunan 2012-2017 yang menyandingkan pertanian organik bersama pariwisata buatan berbasis global. Apabila menganalisis dengan logika pembangunan yang terjadi di Pardikan, penguasa menjadikan dua kekuatan utama pembangunan untuk kesejahteraan. Hal tersebut secara konsep sangat benar namun secara nyata pasti ada satu kekuatan yang dianaktirikan bahkan sirna perlahan-lahan.

Pengembangan pertanian organik lambat berjalan, kontruksi payung hukum tidak secepat baliho di jalan masuk kawasan dan seloga pembangunan yang disajikan dalam ruang-ruang publik. Hal tersebut merupakan bentuk lumpuhnya will to improve (Murray Li, 2007:45) yang menimbulkan adanya amputasi kewarasan publik atas fakta pembangunan berubah menjadi pengiyaan atas kuasa wacana yang dibangun penguasa. Simak saja pewacanaan awal dari hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yaitu satu pejabat Bappelitbangda Wilayah Pardikan, 22 Oktober 2017, sebagai berikut kutipannya:

"Ada beberapa kendala yang harus kami (pemerintah kota Pardikan) tuntaskan agar tiga tahun ke depan program pertanian organik ini berhasil dan menunjukkan kemajuan. "Saya yakin, selama lima tahun sejak digagas dua tahun lalu (2013), pasti sukses". "Program Pertanian Organik ini tidak sebatas petani menanam, tapi bagaimana

program ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi warga".

Payung hukum baru lahir satu tahun setelah digagas, payung hukum tersebut belum berbentuk peraturan daerah namun masih sebatas peraturan walikota yakni Peraturan Walikota Pardikan Nomor 22 tahun 2014 tentang Sistem Pertanian Organik serta dikuatkan dengan Keputusan Walikota Pardikan Nomor 188.45/50/KEP/422.012/2015 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Pertanian Organik.

Pengembangan pertanian organik dengan maksud baik, mengklasterisasi desa-desa potensial untuk kemudian kembali pada sistem pertanian nenek moyang, yang lebih sehat dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Zaman telah berubah, pola pikir petani telah instan. Dalam nurani petani pasti menginginkan untuk kembali bertani dengan organik (seperti nenek moyang dulu) namun lahan pertanian mereka sewa serta pemerintah hanya sebatas pendampingan setengah hati. Hal ini membuat petani tidak punya pilihan. Tangan pemerintah Pardikan harusnya masuk kearah tersebut bukan hanya sebatas bantuan saprodi dan mengurus para petani.

Petani jauh lebih cerdas karena belajar dari pengalaman. Pengembangan pertanian organik harus sepenuh hati melibatkan petani sebagai subyek produktif bukan subyek yang dininabobokan oleh bantuan pemerintah serta bukan malah obyek seperti yang terjadi saat ini. Seolah-olah mereka bodoh atas realitas pertanian dan harus diajarkan dari nol seperti anak baru dilahirkan.

Gagasan di atas menimbulkan pertanyaan kritis yang kemudian hadir dari hasil ruang observasi

peneliti mendasarkan pada kurang bersungguh-sungguhnya pemerintah Pardikan mengangkat hal tersebut atau ada masalah-masalah lain dalam tataran fakta di lapangan. Hal di atas yang akan dikupas lebih dalam dar kajian ini.

C. 3. Aktor dan Kepentingannya

Kekuasaan diatur dalam kuasa wacana yang kuat mempengaruhi individu atau kelompok dalam bahasa, pikiran, pengetahuan dan tindakan atau dalam bahasa Foucault praktik diskursif (Foucault, 2002: 165). Antar aktor dalam pandangannya memiliki kebebasan dan kepentingan untuk mempengaruhi atau patuh dengan konstruksi wacana yang dimunculkan. Singkatnya dalam penerapan kuasa wacana harusnya tidak ada aktor yang mendominasi ritme permainan dalam tataran kehidupan sosial namun faktanya berbanding terbalik pasti akan ada yang rugi dan ada yang untung.

Pengembangan pertanian organik melahirkan pula aktor-aktor yang terlibat dengan kepentingan yang melekat. Antar aktor satu dengan yang lain berebut dinamika dan relasi kuasa untuk saling mempengaruhi praktik diskursif individu/kelompok masyarakat petani (dalam konteks penelitian ini). Kadar loyalitas dan pengaruhnya berbeda satu individu dengan yang lain bergantung atas pengetahuan yang melekat serta seberapa kuat dialektika kuasa wacana mempengaruhi ruang publik dan kontruksi berfikir serta perilaku individu tersebut.

Aktor satu dengan yang lain memiliki alat genealogi kuasa yang beragam. Penguasa dan aktor penggerak menggunakan kata dan pengetahuan konseptual

untuk mempengaruhi aktor yang lain. Anggota DPRD menggunakan pengaruh relasi kuasa untuk menyetting kesepakatan politik atas nama rakyat. Kepala desa lebih persuasif dengan menggunakan jalan musyawarah. Sementara Petani dengan gotong royong dan pengalaman yang dimilikinya membuat institusi sosial baru.

Aktor	Peran	Kepentingan		Alat Genealogi Kuasa
		Langsung	Tidak Langsung	
Walikota	Inisiator	Pencitraan pada kepedulian atas petani	Peningkatan popularitas dan elektabilitas	a. Sambutan b. Pemaparan program pembangunan ke daerah lain, pemerintah daerah, pusat c. Blusukan ke petani d. Panen raya
Bappedalibangda (Eks Nomenklatur: Bappeda) Dan Dinas Pertanian (Eks Nomenklatur: Dinas Pertanian dan Kehutanan)	Perencana di tingkat Eksekutif Dan Penggerak	Pencapaian target program kerja tiap tahun anggaran	Reward atas keberhasilan pencapaian program kerja dengan keberlanjutan program pembangunan pada periode pembangunan selanjutnya	a. Rencana Kerja SKPD (Renja) b. Dokumen Evaluasi Renja SKPD c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) d. Dokumen Evaluasi RKPD
Anggota DPRD Masa Bakti 2009-2014 dan 2014-2019	Perencana di tingkat legislatif Dan Pengawas Pembangunan Daerah	Pengamanan suara dan kepentingan konstituen	Pendongkrak loyalitas konstituen atas yang bersangkutan	a. Sidang Paripurna (arena legalitas keputusan pembangunan daerah) b. Jaring Aspirasi Konstituen c. Mengikuti acara resmi yang berhubungan dengan pengembangan pertanian organik
Petani Kawasan Pengembangan Pertanian Organik	Obyek Program Pengembangan Pertanian Organik	Peningkatan kesejahteraan secara langsung dan berkelanjutan	Peningkatan pendampingan produktivitas dan keberlanjutan pertanian lewat minat generasi muda	a. Kelompok tani b. Modal kerja dari utang atau warisan orang tua c. Mentalitas telum, belajar dari pengalaman dan gotong royong
Kepala Desa Kawasan Pengembangan Pertanian Organik	Pelaksana Dan Pengawas Pembangunan Tingkat Terkecil	Melindungi keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian di desa yang dipimpinnya	Sinergisitas antar pihak terkait serta mengamankan suara pemilih untuk pemilihan selanjutnya	a. Musyawarah dengan petani kelompok maupun non-kelompok b. Pembuatan Peraturan Desa

Tabel Penjabaran Aktor, Peran, Kepentingan dan Alat Genealogi Kuasa dalam Pengembangan Pertanian Organik
 (Sumber data primer)

D. Pembahasan Mendalam: Penguatan Genealogi Kuasa dan Pencitraan Keberhasilan Pertanian Organik

Pembangunan kesejahteraan masyarakat harusnya memberi ruang produktif bagi pengembangan sektor strategis untuk menciptakan peningkatan nyata atas kesejahteraan masyarakat. Perangsang atas hal tersebut dengan membuat kebijakan dan regulasi yang melindungi sektor strategis, bukan malah menjadi alat atas dominasi dan kendaraan aktor yang dominan untuk merebut hak aktor yang lain dengan kepentingan dan kekuasaan yang melekat pada masing-masing aktor.

Genealogi kuasa/kuasa wacana dimaknai lebih luas menjadikan pengetahuan atas wacana yang dikuasakan untuk memperlakukan orang/individu bahkan kelompok masyarakat sebagai subyek, yang darinya subyek tersebut dapat mengembangkan kapabilitas produktifnya sehingga kesejahteraan non-material maupun material dapat tercapai (Foucault, 2002:169). Pemaknaan tersebut menjadi pijakan bagi pemegang kuasa untuk kemudian merencanakan sistem, dengan perencanaan yang memberikan ruang kesepakatan bersama masing-masing pihak yang diberikan mandat untuk merencanakan proses pembangunan, dalam konteks pengembangan pertanian organik dikendalikan oleh Walikota, Bappeda dan Dinas Pertanian dan Kehutanan (menggunakan nomenklatur SKPD saat tahapan perencanaan) pada poros eksekutif daerah. Pada poros legislatif diberikan kepada komisi yang membidangi pembangunan di DPRD dan keputusan tertinggi yaitu Rapat Paripurna DPRD. Pelantikan Walikota periode 2012-2017 dilaksanakan 27 Desember 2012. Tahapan penyusunan/perencanaan

pengembangan pertanian organik memakan waktu Januari 2013 s.d. September 2013. Pengembangan pertanian organik masuk pada salah satu mata anggaran mulai 2013 s.d. 2017.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang mendasari terciptanya hasil pertarungan dalam perencanaan yang melahirkan adanya kesepakatan elite dan penguatan genealogi kuasa yaitu:

1. Motif pengamanan loyalitas suara konstituen masing-masing anggota dewan;
2. Tidak adanya upaya pembuatan wacana tandingan oleh legislatif dalam mengawal pembangunan pertanian; dan
3. Pengambilan keputusan yang bersifat top-down, hierarkhis kolejal, dimana peran pengambilan keputusan dimainkan oleh tataran elite (baik pimpinan dewan, dan komisi).

Deal-deal politik yang terjadi dalam perencanaan, dimana pertarungan kepentingan yang terjadi antar aktor dalam menyetujui pengembangan pertanian organik, bersifat sangat tertutup dan syarat atas perlindungan kepentingan konstituen. Hal tersebut terjadi karena pola pikir anggota dewan yang ingin melindungi petani sebagai konstituen terbesar di Pardikan. Kepentingan eksekutif tersebut secara substansi tidak menjadi problem bagi komisi atau namun secara tidak langsung mempengaruhi secara signifikan perolehan suara di daerah dengan sektor pertanian yang dominan. Banyak individu anggota DPRD yang merasakan hal tersebut.

Lobby politik yang dimainkan eksekutif lewat kesepakatan elite, memberikan pemahaman bahwa keputusan atas persetujuan ini dimainkan oleh pimpinan fraksi di dewan Pardikan dan ketua komisi bidang pembangunan sebagai representasi dari

keseluruhan keputusan komisi. Tahun politik yang makin dekat menimbulkan dengan mudah lobby eksekutif tersebut sukses menghasilkan penguatan genealogi kuasa atas pewacanaan yang dibangun. Penggambaran genealogi kuasa yang kuat dengan menggunakan kehadiran pemerintah atas perlindungan keberlanjutan pertanian serta kesejahteraannya menjadikan kesepakatan satu suara anggota dewan saat sidang paripurna .

Biopolitics bahasa Foucault untuk menerangkan adanya relasi dominan atas kekuasaan yang masif mempengaruhi individu satu dengan yang lain, penerapannya dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau simbol yang sering diistilahkan dengan symbolic violence. Simbol tersebut mempengaruhi cara berfikir, bertindak dan anggapan atas perlindungan dan penciptaan kesejahteraan yang diupayakan (Foucault, 2002:170).

Pengembangan pertanian organik dari awal launching sampai dengan implementasinya telah memanfaatkan symbolic violence yang bersifat tidak langsung melalui kaos launching, billboard pengembangan serta klaim keberhasilan sepihak dengan indikator capaian program dan penciptaan kelompok tani/petani champion yang loyal terhadap aktor penggerak.

Launching pengembangan pertanian organik dilakukan dengan menyelenggarakan gerak jalan sehat pada 9 Maret 2014 . Gerak jalan tersebut dihadiri para pejabat sipil dan militer, kepala desa daerah pengembangan, ASN yang berada dalam dinas terkait, penyuluh pertanian lapangan, serta petani yang berada dalam kawasan pengembangan pertanian organik, gerak jalan tersebut dihadiri 2.500 orang. Dalam acara tersebut kaos yang

menggambarkan pengembangan pertanian organik dibagikan kemasayarakat dalam bentuk hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Pardikan No: 180/114/KEP/422.012/2014. Dalam acara tersebut Walikota Pardikan menyampaikan bahwa pengembangan pertanian organik langkah awal memperbaiki pertanian lebih berkelanjutan dan selaras dengan visi pembangunan Pardikan.

Kaos launching menjadi rangkai awal dari pembrandingan pengembangan pertanian organik. Petani dan masyarakat yang hadir dalam pola pikirnya telah tertanam bahwa proses well being selama ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, sehingga program pembangunan yang diwacanakan tersebut ditunggu di masyarakat untuk benar menciptakan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Prasangka pro rakyat/populis makin naik daun dengan adanya pemasangan Billboard pengembangan pertanian organik pada tahun anggaran 2014 dan diperbaharui pada tahun anggaran 2017 . Hal tersebut memunculkan adanya anggapan masyarakat utamanya individu non-Pardikan bahwa pemerintah Pardikan melindungi keberlanjutan pertanian, namun realitasnya banyak petani yang merasa tertipu atas program ini utamanya petani sayur, mereka mengikuti menanam organik pada medio 2014-2015 namun faktanya aktor penggerak belum siap atas pasar dan pemasaran, hal tersebut berakibat adanya ketidakpercayaan petani terhadap program ini karena harga jualnya sama dengan anorganik.

Klaim keberhasilan satu pihak merupakan bentuk governmentality yang hegemonik dan kerap bersifat kontradiksi (Foucault, 1978, sebagaimana dikutip dalam Haryatmoko, 2013: 113-115). Meminjam

pernyataan governmentality yang ideal merupakan pemberian ruang yang terbuka untuk pilihan atas tindakan yang beragam bersifat produktif dan reproduktif untuk aktor-aktor yang terlibat untuk patuh memanfaatkan ruang tersebut dengan memperhatikan ketentuan atas aturan main yang telah ada serta budaya yang telah melekat dalam tubuh sosial (masyarakat). Jargon peduli dengan petani menjadi semakin membumi ditambah dengan penamaan gedung terpadu pemerintahan kota Pardikan yang diberi nama Among Tani, secara budaya nama tersebut melambangkan adanya semangat yang kuat pemerintah untuk melindungi sektor pertanian dan petani yang berjuang di desa-desa kota Pardikan. Belum lagi jargon tersebut dibagi dalam acara-acara resmi pemerintahan baik Ulang Tahun maupun Studi Banding daerah lain. Lewat hal tersebut menimbulkan klaim keberhasilan dari actor penggerak menjadi diamini oleh masyarakat awam dan aktor lain yang belum mendalami hal tersebut. Klaim keberhasilan tersebut berupa:

- (a) Tambahan daerah pengembangan pertanian organik, dari empat daerah diawal menjadi empat belas daerah pengembangan.
- (b) Identifikasi Pekarangan Organik di semua desa/kelurahan yang menyisakan rak bambu dan menguap seperti program yang bersifat by project atau tuntas setelah tahun anggaran berakhir.
- (c) Demplot Edukasi Pengembangan Pertanian Organik yang menyisakan gapura di tahun 2015. Dua kawasan demplot yang mangkrak mengakibatkan adanya evaluasi dari DPRD Batu, hal tersebut diwacanakan

oleh Haridana Wahyono (Wakil Ketua DPRD Batu, Fraksi Gerindra) yang menyatakan, *“Dalam skala kecil saja sudah gagal, bagaimana dengan program secara makro yang tersebar di beberapa desa?. Kami tidak yakin program pertanian organik menjadi unggulan Pemkot Batu yang sukses”* .

(d) Revitalisasi Lahan Apel yang belum optimal karena perubahan cuaca ekstrim serta belum optimalnya pendampingan pemasaran wisata petik apel yang diupayakan sendiri oleh masyarakat petani .

Petani champion/petani penggerak terdapat pada masing-masing daerah pengembangan selain itu dilakukan pula pembinaan kepada kelompok tani dengan membuat pupuk organik (71 kelompok tani), pestisida nabati (10 kelompok tani) dan agensi hayati (10 kelompok tani) , rencananya hasil dari kelompok tani tersebut akan dimanfaatkan pada daerah pengembangan pertanian organik , namun faktanya di lapangan banyak hasil pupuk organik, pestisida nabati dan agensi hayati yang dimanfaatkan hanya untuk kelompok tani tersebut , kembali lagi janji pemanfaatan hasil pupuk organik dan lainnya hanya sebatas janji manis diawal pengembangan.

Pencitraan keberhasilan yang dominan belum menghubungkan peluang atas optimalisasi sinergisitas antar aktor, yang faktanya masih lemah serta adanya sikap skeptis dan acuh di tengah masyarakat baik petani, kepala desa dan masyarakat lain dalam mendukung atau mengkritisi pengembangan pertanian organik. Hal tersebut harus menjadi bahan koreksi bersama apabila

keberlanjutan program pengembangan pertanian organik akan dijalankan.

Kemenangan dalam pertarungan dinamika dan relasi kuasa atas pengembangan pertanian organik nampak nyata pada tataran praksis. Penguasaan atas jaringan wacana/normalizing judgment yang kuat menjadi faktor dari hal tersebut. Jaringan wacana/normalizing judgment memiliki beragam bentuk (Foucault, 1990: 96). Bentuk tersebut akan mempengaruhi ruang operasionalitas atas kekuasaan lewat legitimasi. Legitimasi atas pelanggaran pewacanaan genealogi kuasa pada ruang publik misalnya: mengklaim pembentukan peraturan daerah, kepedulian pada kesejahteraan petani, dan wacana lainnya.

Penguasa dan aktor penggerak membangun jalan tersebut dengan rapi. Medio 2016 (satu tahun sebelum Walikota demisioner) pemerintah kota Pardikan punya acara besar launching e-commerce berbasis pertanian. Acara tersebut dihadiri menteri kordinator perekonomian (Darmin Nasution), Menkominfo (Rudiantara), Menteri PUPR (Basuki Hadi Mulyono), Menteri Pertanian (Amran Sulaiman), dan Menteri Perdagangan (Enggartiasto Lukito), dalam acara ini walikota menyampaikan bahwa komitmen perkembangan pertanian organik telah berjalan dengan baik dan acara ini sebagai rangkaian dari mengangkat kesejahteraan petani.

Mencitrakan komitmen tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Jumlah petani kota Pardikan 29.855 orang, petani yang mengikuti kelompok tani sebesar 7.232 orang, dengan jumlah kelompok tani 226 kelompok, sementara pengembangan pertanian organik sampai 2017 diikuti 477 orang. Namun cukup banyak kelompok

tani dan usaha pengolahan hasil pertanian yang belum memanfaatkan fasilitas ini karena alasan tidak mengetahui atau belum ada pendampingan sampai arah pemanfaatan teknologi informasi.

Menguatkan gagasan tersebut, Mudhoffir (2013) menjelaskan bahwa *conduct of conduct* yang menggunakan aparatus yang bersifat *disciplinary power* dan *symbolic violence* yang melahirkan aktor dominan. Aktor ini memainkan peran, pengaruh dan pola pikir individu untuk sepakat dengannya tanpa harus melihat realitas lapangan. Aktor penggerak memiliki cara sendiri untuk membangun jalan kemenangan. Daerah pengembangan pertanian organik melahirkan petani champion/penggerak yang dipercaya dan loyal kepada aktor tersebut. Saat kunjungan studi banding daerah lain pasti kelompok tani yang didalamnya terdapat aktor petani championlah yang akan ditunjuk. Terdapat dua daerah pengembangan pertanian organik yang menurut aktor penggerak berhasil, kampung tani Temas dan pengembangan beras organik Pendem. Keduanya pernah dilangsungkan panen raya sayur dan beras organik, sementara kawasan pengembangan lainnya seakan matisuri eksistensinya.

Loyal dan dipercaya aktor penggerak itulah kunci dalam mempengaruhi serta membuat jalan kemenangan mulus tercipta. Sedangkan yang menentang dan mengkritisi akan distigmakan tidak ingin maju dan menghalangi perkembangan pertanian organik yang diwacanakan. Cara-cara aktor dominan dalam membangun jalan mengantarkan pada pendapat bahwa aktor dominan yang menguasai arena relasi dominasi dan kekuasaan akan menemui titik resistence (antitesa dari kekuasaan) karena setiap orang yang berada

pada lingkaran relasi dominasi dan kekuasaan tidak dapat keluar darinya, aktor yang tersubkordinasi dapat mendobrak dari bawah karena kekuasaan dengan relasi yang melekat didalamnya bukanlah relasi struktural hirarkhis yang antar aktor dapat bermain pengaruh untuk menguasai dan dikuasai bergantung dan pengetahuan dan pengalaman tindakan yang melekat dalam masing-masing aktor (Foucault, 1990: 101).

E. Kesimpulan

Memandang dinamika dan relasi kuasa dalam perspektif Foucauldian, sebenarnya menempatkan adanya lima cara bagaimana kuasa beroperasi. Pertama, kekuasaan tidak diperoleh, diambil, dibagikan, karena kekuasaan berjalan dari berbagai titik. Kedua, kekuasaan bersifat cair dan tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan, semua aktor harus saling rela membagi kuasa dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan. Ketiga, hubungan kekuasaan tidak berada dalam posisi suprastruktur, kekuasaan datang dari bawah artinya tidak ada oposisi binair antara yang mendominasi dengan yang didominasi. Keempat, hubungan kuasa bersifat intensional, artinya tidak ada kuasa tanpa rangkaian rasionalitas kuasa. Kelima, kekuasaan selalu mengandung resistensi, karena resistensi bagian dari kuasa itu sendiri (Haryatmoko 2013: 96).

Paparan diatas menyakinkan peneliti bahwa sebenarnya kuasa dengan wacana kuasanya memberikan ruang untuk kemudian mengkerdulkan salah satu aktor yang terlibat, proses ini dipengaruhi oleh penguasaan atas jaringan wacana/ normalizing judgment dan pengetahuan yang melekat pada masing-masing aktor. Kedua faktor tersebut

kemudian membentuk dinamika dan relasi kuasa antar aktor.

Melihat peta dinamika dan relasi kuasa yang terjadi dalam pengembangan pertanian organik, petani menjadi aktor yang dimanfaatkan eksistensinya untuk mendulang popularitas dan klaim keberhasilan. Singkatnya, petani menjadi obyek atas pengembangan/pembangunan. Obyek tersebut harus patuh terhadap instruksi penggerak, bukan mendelegasikan kuasa penuh penggerak untuk meningkatkan obyek menjadi subyek yang selaras atau mitra aktif dalam pembangunan, pemaknaan yang dangkal jika subyek dimodifikasikan dengan subyek penerima bantuan, namun jauh daripada itu subyek harus menjadi kepanjangan tangan dari penciptaan kesejahteraan bersama atas dasar potensi dan keberlanjutannya.

Sudah bukan saatnya lagi petani Pardikan dipandang sebagai obyek, yang menjadi menarik dalam perjalanan pengembangan pertanian organik, terdapat sebagian kelompok tani dan individu petani non-kelompok yang bangkit untuk menjadi mitra aktif pembangunan, Potret tersebut misalnya kelompok tani Tanuse, Sumberejo . Setelah mengetahui hal tersebut baru aktor penggerak mengandeng dan kemudian mengklaim keterlibatan atas keberhasilan dengan menggunakan alat genealogi kuasa melalui dokumen evaluasi Rencana Kerja .

Kebijakan pembangunan pertanian dari orde baru sampai orde desentralisasi tidak membawa perubahan kesejahteraan bagi petani karena dimanipulasi oleh kepentingan aktor dominan. Hal tersebut juga terjadi dalam pengembangan pertanian organik yang dalam perencanaan sampai

implementasi menguntungkan aktor penggerak dengan bentuk hasil pertarungan aktor yang kesemuanya itu memenangkan kepentingan aktor penggerak. Pemaparan tersebut menjadi menguatkan bahwa petani tetap menjadi obyek pembangunan serta subyek yang dinabobokan bantuan atas nama pemerintah meskipun orde pembangunan telah berganti dari sentralistik ke desentralistik, seharusnya sudah saatnya petani menjadi subyek atau mitra aktif dalam pembangunan sehingga kesejahteraan benar dirasakan petani.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta
- Anderson, B.R O'G. 2016. *Kuasa Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*, terj., Revianto Budi Santoso. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Boediono. 2016. *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kompas.
- BPS Kota Batu. 2009. *Produk Domestik Regional Kota Batu 2009*. Batu: BPS Kota Batu.
- BPS Kota Batu. 2013. *Produk Domestik Regional Kota Batu 2013*. Batu: BPS Kota Batu.
- BPS Kota Batu. 2016. *Produk Domestik Regional Kota Batu 2016*. Batu: BPS Kota Batu.
- Foucault, M. 1978. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- Foucault, M. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol 1*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. 2002. *Power/Knowledge*, terj., Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Foucault, M. 2008. *The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France 1978-1979*. Ed
- Sennellart, M, trans. Burchell G Basingstoke: Polgrave Macinillan.
- Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Latif.Y. 2016. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Li-Murray, Tania. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice Politics*. Duke: Duke University Press.
- Linblad, J.T. 2001. *Pondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mudhoffir, A.M. 2013. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol 18, No 1, Januari 2013: 75-100*.
- Skovdal, M. & Cornish, F. 2015. *Qualitative Research for Development A Guide for Practitioners*. UK: Practical Action Publishing.
- Suseno, D. & Suyatna, H. 2006. *Quo Vadis Petani Indonesia! Terhempasnya Anak Bangsa Dari Sektor Pertanian*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ulfah; Setiawan; Rahmawati. 2017. Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 2 (1) (2017): 46-64*.
- Van Zaden, J.L.; Marks, D. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas.
- Yaffe. 2015. *Ekonomi Revolusi Che Guevera*. Tangerang: Marjin Kiri.

Artikel/Berita di Media Massa Offline dan Online:

Batu Times. 10 Februari 2017. *Rasa Lebih Enak, Panenlah Sayur Organik di usia 25 Hari*. (<http://m.batutimes.com/baca/7552/20170210/rasa-lebih-enak-panenlah-sayur-organik-di-usia-25hari>). Diakses pada 23 Desember 2017.

Bhirawa. 24 Oktober 2016. *Petani Kota Batu Keluhkan Pemasaran Padi Organik*. (<http://harianbhirawa.com/2016/10/petani-kota-batu-keluhkan-pemasaran-padi-organik>). Diakses pada 24 Desember 2017.

Jatim Antaranews. 09 Februari 2015. *Walikota Batu: Pertanian Organik Belum Optimal*. (<http://jatimantaranews.com/lihat/berita/151334/wali-kota-batu-pertanian-organik-belum-optimal>). Diakses pada 26 Desember 2017.

Malang Post. 14 Desember 2017. *Kritik Pertanian Organik*. (<http://www.malangpost.com/berita/kota-batu/kritik-pertanian-organik>) Diakses pada 26 Desember 2017.

Merdeka. 06 Januari 2017. *Komitmen Kembangkan Pertanian Pemkot Batu Launching Agroseggar.com*. ([http://m.merdeka.com/malang/kabar-](http://m.merdeka.com/malang/kabar-malang/komitmen-kembangkan-pertanian-pemkot-batu-launching-agroseggar-com)

malang/komitmen-kembangkan-pertanian-pemkot-batu-launching-agroseggar.com-1701062.html). Diakses pada 26 Desember 2017.

Humas Batu. 09 Maret 2014. *Launching Shining Batu Go Organik: Langkah Awal Meningkatkan Kondisi Pertanian*. (<http://humasbatu.blogspot.co.id/2014/03/launching-shining-batu-go-organik.html?m=1>). Diakses pada 26 Desember 2017.

Dokumentasi Wawancara Penelitian:

Wawancara dengan salah satu pejabat Bappelitbangda Pardikan, 22 Oktober 2017.

Wawancara dengan salah satu pejabat Dinas Pertanian, 21 November 2017.

Wawancara dengan salah satu pejabat Dinas Pertanian 24 November 2017

Wawancara dengan salah satu anggota DPRD, 21 Agustus 2017.

Wawancara dengan salah satu kepala desa daerah pengembangan pertanian organik, 26 Juli 2017.

Wawancara dengan salah satu kepala desa daerah pengembangan pertanian organik, 02 November 2017.

Wawancara dengan petani salah satu daerah pengembangan pertanian organik, 16 September 2017.